

**KAJIAN WANITA PUS AKSEPTOR MKJP YANG TIDAK
MEWUJUDKAN NORMA KELUARGA KECIL (NKK)**

(JURNAL)

Oleh

RAUDATUL JANNAH



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Kajian Wanita PUS Akseptor MKJP yang Tidak Mewujudkan Norma Keluarga Kecil (NKK)

Raudatul Jannah¹, Nani Suwarni², Edy Haryono³

FKIP Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

*email: musasimomiji@gmail.com, Telp. +62973075612

Received: Jan, 4th 2018

Accepted: Jan, 4th 2018

Online Published: Jan, 4th 2018

This research aimed to reviewed women of childbearing age of Long Term Contraception Method acceptors who do not realized Small Family Norms in Kelapa Tiga Permai sub-district. This research used descriptive qualitative method. Population in this research were 34 women of childbearing age of LTCM acceptors who had more than two children. Sample of this research were 7 women of childbearing age of LTCM acceptor who had more than two children, the sample was obtained by purposive sampling technique. Data was collected used observation, interviewing, questionnaire, and documentation. Data analysis with percentage tables as the basic of analytic description. Result of the research showed that the factors causing non-existence of Small Family Norms on women of childbearing age of LTCM acceptors : (1) because women of childbearing age started using LTCM after having many children (2) because the seven women of childbearing age of LTCM acceptors have a view to the value of children in having children in the family.

Keywords : ltcn, number of children, small family norms, women of childbearing age

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji wanita pasangan usia subur (PUS) akseptor MKJP yang tidak mewujudkan Norma Keluarga Kecil, titik tekan kajiannya pada faktor-faktor penyebab tidak terwujudnya Norma Keluarga Kecil pada wanita PUS akseptor MKJP di Kelurahan Kelapa Tiga Permai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi penelitian ini adalah 34 wanita PUS akseptor MKJP yang memiliki anak lebih dari dua. Diambil sampel sebanyak 7 wanita PUS secara *purposive sampling*. Pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, kuisioneir, dan dokumentasi. Analisis data dengan tabel persentase sebagai dasar deskripsi analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tidak terwujudnya NKK pada wanita PUS akseptor MKJP: (1) karena penggunaan MKJP baru dilakukan setelah memiliki anak banyak (2) karena ke tujuh wanita PUS akseptor MKJP memiliki pandangan terhadap *value of children* dalam memiliki anak dalam keluarga.

Kata kunci: jumlah anak, mkjp, norma keluarga kecil, wanita pus.

Keterangan:

¹ = Mahasiswa Pendidikan Geografi

² = Dosen Pembimbing 1

³ = Dosen Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Keluarga Berencana merupakan program pemerintah sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat, yakni melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga dengan tujuan untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) dengan dua anak cukup, laki-laki dan perempuan sama saja untuk setiap keluarga. Melalui perwujudan Norma Keluarga Kecil (NKK) diharapkan dapat membantu usaha pengendalian kelahiran penduduk.

Terkait dengan norma dua anak cukup, pada dasarnya setiap pasangan suami istri tentunya bebas dalam menentukan jumlah anak yang ingin dimiliki. Namun demikian, perencanaan jumlah anak tetap diarahkan pada perwujudan NKK, yakni dua anak cukup. Salah satu upaya yang digunakan dalam mewujudkan NKK ialah melalui penggunaan alat kontrasepsi (alkon). Menurut Sulistyawati (2011: 15) bahwa keluarga berencana (*family planning/planned parenthood*) adalah suatu upaya menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi.

Terkait perwujudan NKK melalui penggunaan kontrasepsi, pemerintah lebih mengarahkan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang berguna untuk mempercepat penurunan angka kelahiran penduduk, hal ini disebabkan karena penggunaan MKJP dikatakan lebih efektif dibandingkan dengan Non-MKJP. Akan tetapi,

berdasarkan survei yang dilakukan di Kelurahan Kelapa Tiga Permai, memperlihatkan terdapat 34 wanita PUS akseptor MKJP yang justru memiliki jumlah anak lebih dari dua, dengan kata lain tidak mewujudkan Norma Keluarga Kecil (NKK).

Menurut Siregar (2003: 3-4) bahwa dalam perjalanannya, penerimaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) tentu mengalami beberapa hambatan, antara lain :

Alasan agama, bagi para pemeluk agama merencanakan jumlah anak adalah menyalahi kehendak Tuhan. Kita tidak boleh mendahului kehendak Tuhan apalagi mencegah kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepsi supaya tidak hamil.

Alasan sosial ekonomi, di mana anak dipandang sebagai tenaga kerja yang dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga sehingga mempunyai banyak anak akan banyak tambahan pendapatan yang akan diperoleh.

Alasan adat istiadat, adat kebiasaan adat dari suatu masyarakat yang memberikan nilai anak laki-laki lebih dari anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini akan memungkinkan satu keluarga mempunyai banyak anak.

Selain itu, menurut Hutabarat (1976: 274), tiap suku bangsa mempunyai *value of children* sendiri-sendiri, misalnya anak sebagai penerus sejarah, anak sebagai tenaga kerja, anak sebagai jaminan sosial di hari tua, banyak anak banyak rezeki, anak adalah karunia Tuhan yang tidak dapat ditolak, dan anak sebagai ikatan perkawinan.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka tidak terwujudnya Norma Keluarga Kecil (NKK) pada wanita PUS akseptor MKJP tersebut dapat dimungkinkan oleh karena beberapa faktor seperti: penggunaan MKJP pada wanita PUS, etnis budaya wanita PUS, jumlah anak yang diinginkan wanita PUS, pandangan wanita PUS terhadap nilai anak.

Sehubungan dengan hasil survei dan permasalahan yang telah dijelaskan dalam uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab tidak terwujudnya NKK pada wanita PUS akseptor MKJP dan penggunaan alat kontrasepsi (alkon) pada wanita PUS akseptor MKJP yang memiliki anak lebih dari dua di Kelurahan Kelapa Tiga Permai, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung tahun 2017.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2008: 4) mengartikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif tersebut bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misal diantaranya adalah perilaku persepsi, motivasi, dan tindakan.

Populasi dalam penelitian ini adalah 34 wanita PUS akseptor MKJP yang tidak mewujudkan NKK, yakni memiliki anak lebih dari dua di Kelurahan Kelapa Tiga Permai. Teknik pengambilan sampel dalam

penelitian ini adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 7 wanita PUS akseptor MKJP yang memiliki anak lebih dari dua.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, teknik kuesioner, teknik wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu teknik deskripsi analitik dengan tabel persentase sebagai pendukungnya.

Untuk menjamin autentisitas atau akurasi dan kredibilitas hasil dan interpretasi penelitian ini, maka digunakan triangulasi sumber. Raco (2010: 133) menyatakan bahwa dalam metode kualitatif lebih tepat menggunakan istilah "autentisitas" daripada validitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kelapa Tiga Permai, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung tahun 2017. Kecamatan Tanjungkarang Barat merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Kelapa Tiga Pusat pada tahun 2013.

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukajawa/Gedong Air. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kaliawi Persada. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukadanaham dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kelapa Tiga Pusat. (Monografi Kelurahan Kelapa Tiga Permai, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ke tujuh wanita PUS akseptor MKJP yang tidak mewujudkan NKK di Kelurahan Kelapa Tiga Permai, sebanyak 4 wanita PUS (57,14%) yang memiliki 3 anak menginginkan 2 anak, sedangkan 3 wanita PUS (42,86%) yang masing-masing telah mempunyai 3, 4, dan 5 anak berkeinginan memiliki 3 anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa wanita PUS akseptor MKJP di Kelurahan Kelapa Tiga Permai masih ada yang memiliki keinginan untuk memiliki anak banyak, yakni 3 anak.

Berdasarkan hasil wawancara saat penelitian, wanita PUS akseptor MKJP mengungkapkan bahwa keinginan memiliki lebih dari dua anak disebabkan karena jika hanya memiliki 2 anak dianggap terlalu sepi, sedangkan jika memiliki 3 anak dianggap tidak terlalu sepi dan tidak terlalu ramai, sehingga memiliki 3 anak adalah jumlah yang ideal.

Etnis atau suku wanita PUS akseptor MKJP yang tidak mewujudkan NKK di Kelurahan Kelapa Tiga Permai, meliputi etnis Jawa, Minang, Sunda, Lampung, dan Banten. Etnis yang paling banyak pada wanita PUS akseptor MKJP yang tidak mewujudkan NKK adalah etnis Jawa, yakni sebesar 3 orang (42,88%) dengan total jumlah anak yang dimiliki sebanyak 9 orang anak, sedangkan etnis Sunda, Minang, Lampung, dan Banten masing-masing terdiri dari satu wanita PUS dengan masing-masing persentase sebesar 14,28% dengan total jumlah anak yang dimiliki, yakni 15 anak.

Terkait pandangan terhadap nilai anak, ke tujuh wanita PUS akseptor MKJP yang tidak mewujudkan NKK

di Kelurahan Kelapa Tiga Permai memiliki pandangan bahwa sebuah perkawinan harus memiliki anak, anak sebagai karunia Tuhan yang tidak bisa ditolak, kelahiran anak merupakan bukti perkawinan, anak sebagai penerus keturunan, anak sebagai pewaris harta orang tua, dan memiliki anak menjadi kepuasan batin bagi orang tua. Kemudian, dari ke tujuh wanita PUS tersebut, terdapat 2 wanita yang berpandangan bahwa jika hanya memiliki anak perempuan, maka harus mengusahakan untuk memiliki anak laki-laki. Kedua wanita PUS tersebut beretnis Lampung dan Banten yang masing-masing memiliki 4 dan 5 anak. Wanita PUS beretnis Banten juga menjadi satu-satunya informan yang berpandangan bahwa banyak anak, banyak rezeki dan berapa pun jumlah anak yang dimiliki, maka Tuhan akan menjamin kehidupan anak tersebut.

Selanjutnya, hasil penelitian pun menunjukkan bahwa jenis alat kontrasepsi (alkon) yang pertama kali digunakan oleh ke tujuh wanita PUS akseptor MKJP yang tidak mewujudkan NKK di Kelurahan Kelapa Tiga Permai adalah non-MKJP, seperti pil dan suntik.

Tabel 1.
Jumlah Wanita PUS Berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi (Alkon) yang Digunakan Pertama Kali

Jenis Alkon	Jumlah Anak yang Dimiliki			Jumlah Wanita PUS	%
	3	4	5		
Pil	2	-	-	2	28,57
Suntik	3	1	1	5	71,43
Jumlah	5	2	-	7	100,00

Sumber : Hasil penelitian, 2017

Tabel 1 memperlihatkan bahwa dari ke tujuh wanita PUS yang tidak mewujudkan NKK, sebanyak 5 wanita PUS (71,43%) menggunakan alkon suntik sebagai alkon yang pertama kali digunakan, sedangkan 2 wanita PUS lainnya (28,57%) menggunakan alat kontrasepsi pil. Ke lima wanita PUS yang pernah menggunakan alat kontrasepsi suntik merupakan wanita yang saat ini telah memiliki 3, 4, dan 5 anak. Beberapa alasan yang kemudian melatarbelakangi pemilihan alkon suntik, diantaranya karena penggunaan alkon suntik dianggap lebih nyaman dibandingkan pil yang penggunaannya harus dikonsumsi setiap hari, sehingga terkadang mudah lupa, serta wanita PUS masih takut menggunakan alkon lain, seperti *implant* dan suntik.

Ke tujuh wanita PUS akseptor MKJP yang tidak mewujudkan NKK, seluruhnya baru mulai menggunakan MKJP setelah memiliki anak banyak (lebih dari dua). Berikut merupakan tabel komposisi wanita PUS akseptor MKJP yang tidak mewujudkan NKK berdasarkan jenis MKJP yang digunakan saat ini.

Tabel 2.

Komposisi Wanita PUS Akseptor MKJP yang Tidak Mewujudkan NKK Berdasarkan Jenis MKJP yang Digunakan Saat Ini

Jenis MKJP	Jumlah Anak yang Dimiliki			Jumlah Wanita PUS	%
	3	4	5		
IUD	2	-	-	2	28,57
<i>Implant</i>	3	-	-	3	42,86
MOW	-	1	1	2	28,57
Jumlah	5	1	1	7	100,00

Sumber : Hasil penelitian, 2017

Berdasarkan tabel 2 di atas, jenis MKJP yang paling banyak digunakan saat ini oleh wanita PUS akseptor MKJP yang tidak mewujudkan Norma Keluarga Kecil (NKK) ialah alkon *implant*, yakni sebanyak 3 wanita PUS (42,86%) yang seluruhnya memiliki 3 anak. Dua wanita PUS (28,57%) yang memiliki 3 anak menggunakan IUD, sedangkan 2 wanita PUS lainnya (28,57%) yang masing-masing memiliki 4 dan 5 anak melakukan Metode Operasi Wanita (MOW).

Terkait dengan penggunaan MKJP, berdasarkan hasil wawancara, wanita PUS akseptor MKJP yang memiliki 3 anak mulai menggunakan MKJP setelah melahirkan anak ketiga untuk menghentikan kehamilan atau tidak ingin menambah jumlah anak lagi. Kemudian, terdapat satu informan yang memiliki 3 anak dan baru mulai menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) setelah melahirkan anak kedua dengan tujuan penggunaan MKJP untuk menjarak kelahiran anak kedua dengan anak berikutnya. Selanjutnya, dua wanita PUS lainnya mulai menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) setelah memiliki 4 dan 5 anak.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa ke tujuh wanita PUS akseptor MKJP yang tidak mewujudkan Norma Keluarga Kecil (NKK) di Kelurahan Kelapa Tiga Permai, baru mulai menggunakan MKJP ketika sudah memiliki jumlah anak lebih dari dua, yakni setelah memiliki tiga anak dan empat anak dan bertujuan untuk menghentikan kehamilan, sehingga ini berarti

sebelum menggunakan MKJP, jumlah anak yang dimiliki oleh wanita PUS tersebut sudah lebih dari dua.

Wanita PUS akseptor MKJP yang tidak mewujudkan Norma Keluarga Kecil (NKK) menggunakan MKJP, seperti IUD, implant, dan Metode Operasi Wanita (MOW) untuk tujuan menghentikan kehamilan (tidak ingin menambah jumlah anak lagi). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Leli dan Hadriah (2007: 26-27) yang menyebutkan bahwa wanita dengan anak lahir hidup lebih dari 2 mempunyai kesempatan memakai kontrasepsi lebih besar sebanyak 2 kali dibandingkan wanita dengan 2 anak atau kurang. Artinya, penggunaan MKJP di kalangan wanita PUS dalam penelitian ini masih terpaku pada tujuan penghentian kehamilan, meskipun pada dasarnya MKJP juga dapat digunakan untuk menunda kehamilan atau menjarak kelahiran anak lebih dari dua tahun.

Berdasarkan hasil penelitian, 100% wanita PUS akseptor MKJP yang tidak mewujudkan Norma Keluarga Kecil (NKK) berpandangan bahwa sebuah perkawinan harus memiliki anak, anak sebagai karunia Tuhan yang tidak bisa ditolak, kelahiran anak sebagai bukti perkawinan, anak sebagai penerus keturunan, anak sebagai pewaris harta orang tua, dan anak menjadi kepuasan batin bagi orang tua. Selain itu, terdapat wanita PUS akseptor MKJP yang memiliki pandangan nilai anak bahwa jika hanya memiliki anak perempuan saja, maka harus mengusahakan untuk memiliki anak laki-laki. Artinya, lengkapnya jenis kelamin anak (laki-laki dan perempuan) dalam keluarga menjadi kepuasan batin tersendiri bagi orang tuanya.

Salah satu wanita PUS yang berpandangan bahwa jika hanya memiliki anak perempuan, maka harus mengusahakan untuk memiliki anak laki-laki merupakan akseptor MKJP yang bersuku Lampung dan telah memiliki 4 orang anak, yakni anak pertama, kedua, dan ketiganya berjenis kelamin perempuan dan anak keempat berjenis kelamin laki-laki.

Hal ini dapat diakibatkan karena masyarakat etnis Lampung menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang menarik garis keturunan melalui ayah. Anak laki-laki tertua dianggap sebagai pewaris, baik mewarisi jabatan/kedudukan adat maupun juga sebagai pewaris dalam kekayaan orang tuanya (sistem kewarisan mayorat). Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan masyarakat etnis Lampung beranggapan bahwa mempunyai anak laki-laki merupakan suatu keharusan bagi masyarakat Lampung. Bahkan, kehadiran anak laki-laki pertama akan disambut dengan gembira, biasanya diadakan pesta selamatan yang besar untuk menyambut kelahiran anak mereka.

Wanita PUS akseptor MKJP yang bersuku Banten juga berpandangan jika hanya memiliki anak perempuan maka harus tetap mengusahakan untuk memiliki anak laki-laki dan berpandangan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Wanita PUS tersebut meyakini bahwa mempunyai anak banyak merupakan suatu anugerah, sehingga muncul pandangan bahwa berapa pun jumlah anak, maka Tuhan akan menjamin kehidupan anak tersebut. Pandangan terhadap nilai anak tersebut memiliki arti bahwa orang tua tidak perlu khawatir terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya, sebab setiap anak sudah

memiliki rezekinya masing-masing yang dijamin oleh Tuhan.

Berbeda dengan masyarakat etnis Lampung yang menganut sistem patrilineal dengan menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris keluarga, maka lain halnya dengan masyarakat etnis Minang. Masyarakat etnis Minang menganut prinsip-prinsip matrilineal (garis keturunan dan harta warisan diturunkan melalui garis ibu/perempuan), sehingga perempuan Minang memperoleh posisi yang lebih kuat di dalam keluarga jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakat etnia lain pada umumnya. Kaum ibu turut memainkan peran penting dalam menentukan sukses dan gagalnya pelaksanaan setiap keputusan yang dibuat oleh kaum laki-laki dalam posisi mereka sebagai kepala keluarga.

Pandangan pentingnya memiliki anak perempuan dalam etnis Minang tersebut masih diikuti oleh salah satu wanita PUS akseptor MKJP yang tidak mewujudkan NKK di Kelurahan Kelapa Tiga Permai. Setelah wanita PUS tersebut memiliki dua anak laki-laki, tetapi kemudian mengusahakan agar memiliki anak ketiga dengan jenis kelamin perempuan, akan tetapi anak ketiganya ternyata berjenis kelamin laki-laki lagi.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa setiap wanita PUS memiliki pandangan tersendiri terhadap nilai anak. Lebih lanjut, latar belakang etnis budaya maupun kondisi sosial dan ekonomi dapat menjadi penyebab perbedaan pandangan terhadap nilai anak.

Pandangan-pandangan nilai terhadap kehadiran anak tersebut sesuai

dengan pendapat yang dikemukakan oleh San S. Hutabarat (1976: 274) bahwa “tiap suku bangsa mempunyai *value of children* sendiri-sendiri, misalnya anak sebagai penerus sejarah, anak sebagai tenaga kerja, anak sebagai jaminan sosial di hari tua, banyak anak banyak rezeki, anak adalah karunia Tuhan yang tidak dapat ditolak, dan anak sebagai ikatan perkawinan.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini, tidak terwujudnya NKK pada wanita PUS akseptor MKJP dapat disebabkan oleh karena penggunaan MKJP baru dilakukan oleh wanita PUS setelah memiliki anak banyak (lebih dari dua). Selain itu, pandangan wanita PUS terhadap nilai-nilai anak yang dipengaruhi oleh nilai budaya pada etnis suku bangsa yang melatarbelakangi wanita PUS akseptor MKJP memiliki anak lebih dari dua orang. Oleh karena itu, pandangan wanita PUS akseptor MKJP terhadap nilai anak (*value of children*) dan etnis budaya juga merupakan faktor penyebab tidak terwujudnya Norma Keluarga Kecil (NKK) pada wanita PUS akseptor MKJP di Kelurahan Kelapa Tiga Permai tahun 2017.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian, maka dapat disimpulkan:

Bahwa faktor penyebab tidak terwujudnya Norma Keluarga Kecil (NKK) pada wanita PUS akseptor MKJP di Kelurahan Kelapa Tiga Permai, karena terdapat kecenderungan wanita PUS ingin mempunyai

anak lebih dari dua. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandangan terhadap nilai anak (*value of children*) yang dipengaruhi nilai budaya etnis yang dipercayai oleh wanita PUS tersebut.

Bahwa dari ke tujuh wanita PUS akseptor MKJP yang tidak mewujudkan NKK di Kelurahan Kelapa Tiga Permai, seluruhnya baru mulai menggunakan MKJP, seperti IUD, *implant*, atau MOW setelah memiliki anak banyak (lebih dari dua) dengan tujuan menghentikan kehamilan (tidak ingin menambah anak lagi).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

Bagi wanita PUS di Kelurahan Kelurahan Kelapa Tiga Permai, hendaknya lebih meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan Norma Keluarga Kecil (NKK), yakni dua anak cukup, laki-laki dan perempuan sama saja.

Bagi wanita PUS di Kelurahan Kelapa Tiga Permai hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan perihal penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, di mana penggunaan MKJP tidak hanya diperuntukkan untuk menghentikan kehamilan karena sudah tidak ingin menambah anak lagi, melainkan juga dapat digunakan bagi wanita yang ingin menunda kehamilan lebih dari dua tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Bikers Pintar. 2014. *Sistem Kekeluargaan Patrilineal Pada Masyarakat Adat Lampung*.

Artikel diakses dari <http://arti-definisi-pengertian.info/sistem-kekeluargaan-patrilineal-pada-masyarakat-adat-lampung/> pada tanggal 15 Desember 2017 Pukul 04.06 WIB.

Hutabarat. S. 1976. *Pendidikan Kependudukan : Kumpulan Pokok Untuk Mahasiswa IKIP, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Keguruan / Proyek Nasional Kependudukan*. Proyek Nasional Pendidikan Kependudukan : BKKBN Pusat. Jakarta.

Leli A. & Hadriah Oesman . 2007. *Analisis Lanjut SDKI 2007: Faktor Yang Mempengaruhi Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*. Penerbit KB dan Kesehatan Reproduksi, BKKBN. Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*. Grasindo. Jakarta.

Siregar. F. 2003. *Pengaruh Nilai dan Jumlah Anak Pada Keluarga Terhadap Norma Keluarga Kecil bahagia (NKKBS)*. Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara.

Sulistyawati, Ari. 2011. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Salemba Medika. Jakarta.